

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bersarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara belum optimal dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini disebabkan tidak adanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa kepada BPD pada 2 (dua) lokasi penelitian, tidak diserahkannya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh kepala desa kepada BPD, tidak adanya laporan BPD kepada Bupati melalui Camat, hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam optimalisasi peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja BPD
 - b. Minimnya anggaran operasional BPD
 - c. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) BPD yang belum memadai
 - d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peran BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 - a. Upaya peningkatan sarana dan prasarana
 - b. Peningkatan anggaran operasional
 - c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPD
 - d. Pemberian peringatan terkait dengan laporan keterangan penyelenggaraan desa
 - e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan
 - f. Membangun kerja sama
 - g. Penyediaan mekanisme pengaduan

B. Saran

1. Untuk meningkatkan peranan pengawasan, BPD perlu mengikuti pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan, BPD hendaknya terus aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan terjun langsung kelapangan untuk memastikan pengelolaan anggaran oleh Kepala Desa agar tepat sasaran.
3. Untuk pemerintahan desa kiranya lebih membuka diri bekerja sama dengan BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena selama ini pemerintahan desa belum kooperatif terhadap permintaan laporan dari BPD.

4. Untuk pemerintahan Kabupaten, kiranya Bupati dapat memberikan teguran terhadap BPD yang tidak dapat memberikan laporan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Camat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2023, *Kecamatan Natal Dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara
- C.S.T Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Dini Suryani, 2018, *Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Istimewa dalam Desentralisasi Asimetris*, Bintang Obor, Jakarta
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang
- Gartiria Hutami, Anis Chariri, 2011, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, Hasil Penelitian, Universitas Diponegoro
- H.R Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta
- Hadari Nawawi, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Joanne V. Magindaan, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance*, Unsrat Press, Manado
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozin, Nusa Media, Bandung

- Moh. Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UI Fress, Yogyakarta.
- Moh. Rofii Adji Syketi, 2008, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*, Cempaka Putih, Klaten
- Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Unimal Press, Aceh
- Ni' atul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurcholis, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang
- Nurmi Chatim, 2006, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Nurul Widyawati Islami Rahayu, 2017, *Good Governance Zakat*, LP3DI Press, Lumajang
- Prayudi Atmosudirjdo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rahmawati Sururama, 2020, *Pengewasan Pemerintah*, Cendikia Press, Bandung.
- Reydonnyzar Moenek, dkk, 2019, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gloria Madani Press. Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soerjono Seokanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta

Soetandyo Wingnjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian Hukum dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta

Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Hukum dan Praktek*, RinekaCipta, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Widjaja, 2003, "*Otonomi Daerah*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yusri Munaf, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

C. Sumber Lainnya

Fajar Rahmatullah, Ahmad Farhn Rahmatullah, 2021, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmi Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 47, No. 1, Juni.
- Achmad Sodik Sudrajat, 2010, Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Pengaturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 03
- Ade Cahyat, 2004, Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan, *Jurnal Governance Brief*, No. 3, November
- Agung Suseno, 2010, Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, Jan – April 2010
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, 2017, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2017
- Galih Wicaksono, dkk, 2019, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi, *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1
- Jefri S. Pakaya, 2016, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, Maret
- Meri Yanis, 2014, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei
- Putri Yuni Astuti dan Lena Satlita, 2018, Penerapan Prinsip Goodi Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 3, No. 2.
- Rano Asoka, 2018, Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa, *Jurnal Jemasi*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni.
- Rantika Safitri, 2022, Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya), *Jurnal Petikum*, Vol. 2, No. 1
- Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, 2017, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048

- Weny A. Dunga, dkk, 2017, Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1, Periode Mei.
- Yenny, 2013, Prinsip-Prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2
- Zulman Barniat, 2018, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2 Desember
- Angling Aditya Purbaya, *Ketua KPK: Dana Bantuan ke Desa Tinggi, 651 Kades Terjerat Kasus Hukum*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6433065/ketua-kpk-dana-bantuan-ke-desa-tinggi-651-kades-terjerat-kasus-hukum>
- Hadi. S, *Ditetapkan Tersangka Oleh Polres Brebes, Kades Pamedaran Belum ditahan, Ada Apa?*. <https://eranasional.com/ditetapkan-tersangka-oleh-polres-brebes-kades-pamedaran-belum-ditahan-ada-apa>
- Prima Syahbana, *Korupsi Berjamaah Dana Desa Rp. 15M, Kades-BPD di Muara Enim Ditangkap*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6439066/korupsi-berjamaah-dana-desa-rp-15-m-kades-bpd-di-muara-enim-ditangkap>